

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PENDAPATAN PADA
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



**OLEH:
SILMI FEBITA
NPM. 210411054**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universita Islam Kuantan Singingi maupun perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, April 2025
Yang membuat pernyataan



SILMI FEBITA
NPM. 210411054

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PENDAPATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : SILMI FEBITA
NPM : 210411054
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



DESRIADI S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



RIKA RAMADHANTI S.Ip., M.Si
NIDN. 1030058402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 24
Bulan : April
Tahun : 2025

TIM PENGUJI

Ketua



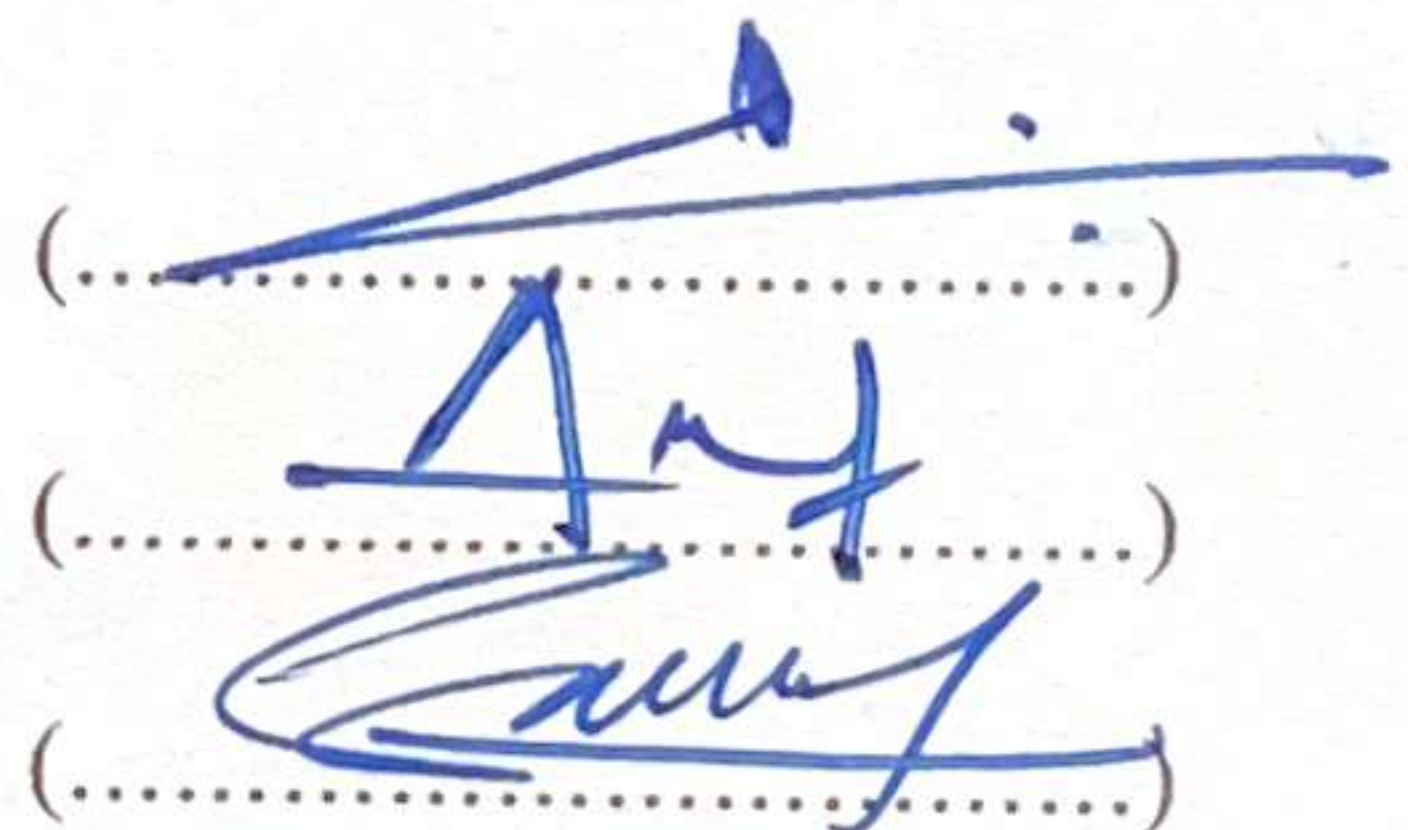
EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Sekretaris



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

1. **DESRIADI, S.Sos., M.Si** (Anggota 1)
2. **ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si** (Anggota 2)
3. **SARJAN M, S.Sos., M.Si** (Anggota 3)



(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

(QS Al-Baqarah: 216)

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kesehatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan untuk

Papa tercinta, Febi Daulay, dan Mama tersayang, Rita Harahap,
yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan tanpa lelah yang tak pernah berhenti mengalir untukku.

Dan untuk adik-adikku tersayang:

M. Reza, Olivia Daulay, Anggiza Rahmi Daulay, dan Ibrahim Daulay
terima kasih telah menjadi bagian dari semangatku. Senyuman dan candamu adalah penghibur di kala lelah, dan doamu adalah kekuatan di setiap perjuanganku.

Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari rasa syukurku kepada keluarga yang begitu luar biasa.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

Silmi Febita
NPM. 210411054

Digitalisasi dalam pelayanan publik merupakan inovasi yang dapat membuat proses pelayanan dan administrasi dapat efektif dan efisien begitu juga dengan pelayanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Implementasi Elektronik Pendapatan. Penelitian ini berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini menggunakan empat indikator dari buku (Indriyani 2020) meliputi E-Leadership, Infrastruktur, Pengelolaan Informasi dan Sumber Daya. Penelitian menggunakan mix method dengan responden sebanyak 18 orang. Dengan hasil penelitian menunjukkan rata-rata "4,39" kategori sangat baik yang menandakan E-Pendapatan Terimplementasikan.

Kata Kunci : Implementasi, E-Pendapatan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC REVENUE AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

By:

Silmi Febita
NPM. 210411054

Digitalization in public services is an innovation that can make administrative and service processes more effective and efficient, including in tax services. This study aims to identify and analyze the implementation of Electronic Revenue. The research was conducted at the Regional Revenue Agency of Kuantan Singingi Regency. This study uses four indicators from the book (Indriyani, 2020), namely E-Leadership, Infrastructure, Information Management, and Resources. The research applied a mixed-method approach with 18 respondents. The results of the study show an average score of 4.39, which falls into the "very good" category, indicating that Electronic Revenue has been well implemented.

Keywords: Implementation, E-Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad shalallahu alihi wassalam, karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahaya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga dalam penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Hingga pada akhirnya penulis sadari semua akan indah pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhandi, S.IP, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dan selaku Pembimbing II
3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak **Desriadi S.Sos., MSi** selaku pembimbing I

5. Seluruh staff pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Kedua orang tua penulis, papa **Febi Daulay** dan mama **Rita Harahap**. Terimakasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, cucuran keringat dan air mata serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya.
7. Saudara dari penulis, **M.Reza**, **Olivia Daulay**, **Anggiza Rahmi Daulay** dan **Ibrahim Daulay** yang telah senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Teluk Kuantan, April 2025



Silmi Febita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 Teori Administrasi Negara.....	6
2.1.2 Teori Kebijakan Publik.....	10
2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan.....	14
2.1.4 Teori E-Government	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	21
2.3 Hipotesis Kerja.....	21
2.4 Definisi Operasional.....	
2.4.1 E-Leadership	13
2.4.2 Infrastruktur	13
2.4.3 Pengelolaan Informasi	13
2.4.4 Sumber Daya.....	13
2.5 Operasional Variabel.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Responden	16
3.3 Sumber Data	16

3.3.1 Data Primer	16
3.3.2 Data Sekunder	16
3.4 Lokasi Penelitian	16
3.5 Metode Pengumpulan Data	16
3.6 Metode Analisis Data	17
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	17
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
4.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	33
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	33
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi.....	34
4.1.3 Topografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	36
4.2 Gambaran Umum Bapenda	38
4.2.1 Sejarah berdiri.....	38
4.2.2 Visi dan Misi.....	39
4.2.3 Tujuan dan Sasaran.....	40
4.2.4 Dasar Hukum Pembentukan dan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
5.1 Identitas Responden	43
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur	44
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja	44
5.2 Hasil Penelitian Implementasi Elektronik Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	45

5.2.1 Indikator <i>E-leadership</i>	45
5.2.2 Indikator Infrastruktur.....	51
5.2.3 Indikator Pengelolaan Informasi.....	58
5.2.3 Indikator Sumber Daya.....	67
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan.....	80
6.2 Saran.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kuantan Singingi	4
Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	28
Tabel 3.1 Jumlah Responden	29
Tabel 3. 2 Penskoran Skala <i>Likert</i> Pada Penelitian	30
Tabel 3. 3 Kategori Penskoran Skala Persentase	31
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi	37
Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	44
Tabel 5.3 Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 5.4 Identitas Responden berdasarkan masa kerja.....	45
Tabel 5.5 Tanggapan Responden untuk Pernyataan Komitmen Pemimpin.....	46
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Pernyataan arahan dan pelatihan	47
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Pernyataan Dukungan Inovasi	48
Tabel 5.8 Rekapitulasi tanggapan indikator e leadership.....	50
Tabel 5.9 Tanggapan Responden Pernyataan Koneksi Internet.....	51
Tabel 5.10 Tanggapan Responden pada pernyataan kedua Perangkat.....	53
Tabel 5.11 Tanggapan responden pada pernyataan Penyediaan Infrastruktur.....	55
Tabel 5.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Indikator Infrastruktur	57
Tabel 5.13 Tanggapan Responden pada Pernyataan Penginputan Data	59
Tabel 5.14 Tanggapan Responden pada Pernyataan Keamanan.....	61
Tabel 5.15 Tanggapan Responden Pernyataan Visualisasi Data	63
Tabel 5.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden pada Indikator Pengelolaan Informasi	65
Tabel 5.17 Tanggapan Responden tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.....	67
Tabel 5.18 Tanggapan Responden pada Pernyataan Pengelolaan Sumber Daya	69

Tabel 5.19 Tanggapan Responden tentang Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya	71
Tabel 5.20 Rekapitulasi tanggapan responden Indikator Sumber Daya	72
Tabel 5.21 Rekapitulasi Tanggapan keseluruhan Responden.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah memiliki peran dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 Ayat 2 menegaskan bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan, mengawasi, dan mengatur secara langsung urusan di daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka pemerintah pusat memberikan sebagian urusan kepada daerah yaitu berupa desentralisasi.

Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Berkaitan dengan urusan yang diserahkan kepada daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak pemerintahan daerah memiliki hak sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2. Memilih pimpinan daerah.
3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. .Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan anggaran keuangan setiap daerah yang mana setiap tahunnya dibuat untuk dibahas dengan lembaga yang berwenang. Pada APBD terdapat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Pendapatan APBD yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri adalah pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan BUMD

Pajak daerah berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2009 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri pajak daerahnya, Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah, terdapat beberapa objek pajak daerah seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 ada beberapa jenis pajak daerah yaitu PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) yang terdiri atas, Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan, Jasa Kesenian dan Hiburan., Pajak Reklame, PAT (Pajak Air Tanah), Pajak MBLB (Mineral bukan Logam dan Batuan), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB (Pajak Pokok Kendaraan Bermotor) dan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Mekanisme pembayaran pajak di setiap daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, membayar sendiri pajak yang terutang dan pemotongan atau pemungutan pajak. Pembayaran sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan dengan cara membayar sendiri angsuran setiap bulan, hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan dimana pihak pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam pengelolaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan sebuah aplikasi yang membantu di dalam pelaksanaan pengelolaan

pajak daerah yang bernama Elektronik Pendapatan atau E-Pendapatan, aplikasi ini merupakan sebuah inovasi pelayanan berbasis digital. Melalui peraturan Bupati No 32 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi.

Tabel 1.1 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Pendapatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp931.197.200	Rp19.100.175.649	Rp20.287.152.2 14
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp44.360.272.91 6	Rp15.878.527.178	Rp212.621.849.539
3	Pajak Hotel	Rp42.175.178.24 8	Rp430.753.822	Rp644.335.820
4	Pajak Reklame	Rp4.298.981.184	Rp1.295.780.030	Rp1.194.921.376
5	Pajak Air Tanah	Rp35.467.217.64 6	Rp700.792.990	Rp859.206.135
6	Pajak Penerangan Jalan	Rp139.014.379.3 52	Rp73.360.650.873	Rp80.778.824.10 0
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	Rp3.635.077.054	Rp1.537.670.864	Rp1.641.170.26 3
8	Pajak Hiburan	Rp4.436.741.184	Rp192.468.000	Rp287.060.007
9	Pajak Parkir	Rp14.990.544.52 2	Rp676.266.000	Rp879.568.048
10	Pajak Restoran	Rp8.683.920.945	Rp6.001.008.079	Rp7.642.479.55 2
Jumlah		Rp297.993.512.2 72	Rp119.174.093.485	Rp326.836.567.055

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dari data tersebut jikalau Elektronik Pendapatan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dapat menaikkan Realisasi penerimaan Pajak yang dimana tujuannya adalah dapat digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak dan juga mendapatkan ketetapan yang berlaku secara online.

Untuk itu penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pelaksanaan **“IMPLEMENTASI ELEKTRONIK PENDAPATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana implementasi elektronik pendapatan pada badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Elektronik Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara subyektif, meningkatkan ilmu untuk melatih kesanggupan berpikir ilmiah untuk menyusun karya ilmiah
2. Secara praktis, hasil pengkajian diinginkan bisa berupa pendapat dan masukan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui implementasi Elektronik Pendapatan,
3. Secara akademis, pengkajian bisa memberikan pendapat dan referensi untuk karya ilmiah jurusan administrasi negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “administration”, dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage (mengelola). Administrai juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “administratie”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya .

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah Universal Application. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya umat manusia dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substantial ia adalah sama.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat

menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, seperti memberikan bahanbahan, sarana-sarana, instruksi-instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Anggara, 2016).

Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangkanketerangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisah-pisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

2. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris), yaitu:

- a. Menurut H. A. Simon mengemukakan bahwa “*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*”

(administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama).

b. Menurut Luther Gulick mengemukakan bahwa “*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*” (administrasi adalah yang berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan).

Didalam bukunya (Anggara, 2016) ada beberapa pengertian administrasi menurut para ahli yaitu :

1. Menurut John M. Pliffner Administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan penjurusan sumber-sumber dan bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
2. Menurut Leonard D. White Administrasi adalah suatu proses yang terdapat secara umum dalam segala usaha kelompok manusia, usaha negara atau swasta, usaha kecil ataupun besar
3. Menurut William H. Newman Administrasi adalah pedoman kepemimpinan dan pengawasan usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama
4. Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo Administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha, usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar, atau kecil.
5. Menurut Sondang P. Siagian Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih

yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

6. Menurut The Liang Gie Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Menurut Soekarno K Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor terjadinya administrasi ialah:

1. kelompok orang-orang yang sepakat untuk bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan bersama
2. kerja sama rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama secara teratur, dua orang atau lebih.
3. tujuan (goal) nilai hajat hidup manusia, baik dalam bentuk fisik materiil maupun dalam bentuk mental spiritual.

Administrasi mempunyai ciri-ciri yang menjadi dasar dalam proses kegiatan administrasi, yaitu

8. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih
9. Adanya kerja sama dari kelompok tersebut.
10. Adanya kegiatan atau proses atau usaha.
11. Adanya bimbingan dan kepemimpinan
12. Adanya tujuan yang telah disepakati bersama.

Administrasi Negara adalah cabang ilmu yang mempelajari seluruh kegiatan atau proses mengenai kerjasama di antara manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan yang berupa kerjasama tersebut sifatnya umum dalam arti telah ada sejak jaman dahulu sampai sekarang. Kerjasama itu sendiri sifatnya dapat menjurus kearah pencapaian tujuan pribadi (privat) dan dapat pula menjurus kearah pencapaian tujuan masyarakat (publik) (Ummah, 2019).

Penyelenggaraan ilmu administrasi pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap kegiatan dalam administrasi diupayakan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara masukan dengan keluaran

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan

Salah satu output dari penyelenggaraan pemerintahan adalah kebijakan publik, oleh karena itu substansi dan proses kebijakan publik selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan dan sistem pemerintahan.

Substansi dan proses kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pemerintahan suatu negara, karena peran negara sebagai wadah dari proses kebijakan publik itu sendiri.

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut (Kurniati et al., 2015).

Menurut suharno di dalam buku (Kurniati et al., 2015 : 13) ada beberapa ciri ciri Kebijakan Publik yaitu :

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
4. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
5. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerinta harus

mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi atau masalah yang ada.

Menurut William N dunn di dalam buku (Kurniati et al., 2015 : 15) ada beberapa tahap Kebijakan Publik

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling be endapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk

dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi atau legitimasi

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah kebijakan, program

program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Kebijakan Publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilalukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Engkus, 2022).

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Menurut Pressman dan Widavsky di dalam buku (Pramono, 2020 : 1) Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang

berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Langkah panjang dari suatu proses kebijakan bermuara pada bagian implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya, proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan bagian te enting dalam pelaksanaan program dari suatu proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana dalam pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertim-bangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan (Asiva, 2015 : 1). Dengan kata lain, implementasi

kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Asiva, 2015 : 1).

Pengertian mengenai implementasi kebijakan publik sangat beragam. Anderson mengemukakan bahwa: *"Policy implementation is the application by government's administrative machinery to the problems"* (Pelaksanaan kebijakan adalah aplikasi oleh mesin/badan administrasi pemerintah terhadap masalah-masalah) . Kemudian Edward III menjelaskan bahwa: *"Policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects"* (pelaksanaan kebijakan adalah tahap pembuatan antara pembentukan sebuah kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan untuk orang-orang yang terpengaruh atas kebijaksanaan tersebut). Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah penerapan hasil perumusan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat atau orang-orang yang terpengaruh atas kebijakan tersebut. Tahapan implementasi kebijakan dilakukan setelah tahap formulasi kebijakan publik. Dalam tahapan ini, apa-apa yang sudah dituliskan dalam formulasi akan diterapkan pada masyarakat luas. Tujuan dilaksanakan implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijiwijoto "implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". (Maranda, 2020:1).

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang

menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- (1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- (3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- (4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- (5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- (6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi

implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.

Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: *“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Menurut Syauckani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes*. bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobilisasi atau para aparat yang berkepentingan.

2.1.4 Teori *E Government*

Perubahan isu global, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat pula perubahan lingkungan global dan kultur birokrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melaksanakan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut secara luas dalam proses pemerintahan, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*), transparansi dan akuntabel (Hertiarani, 2020).

Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tujuan Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tujuan *E-Government* yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat,
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional,
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik

bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara,

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Fungsinya adalah memayungi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang *e-Government*.

e-Government telah berkembang dari teknologi informasi (TI) dan khususnya dari teknologi berbasis Web. Sebagai pengembangan dan penerapan masyarakat informasi, sehingga memiliki e-government, teknologi informasi yang diterapkan di lingkungan pemerintah maju pesat. Hal ini diperlukan untuk melihat ke dalam implikasi dan kemajuan teknologi informasi bersama dengan perkembangan masyarakat informasi untuk memahami isi dan makna dari e-government (Indrayani, 2020). Inti dari e-government adalah untuk mengubah administrasi publik untuk berinovasi hubungan internal dan eksternal dengan bantuan teknologi elektronik.

Didalam bukunya (Indrayani, 2020 : 30) menyebutkan bahwa Tujuan utama dari e-government adalah menempatkan pemerintah dalam posisi yang paling efisien dan sebagai bentuk dengan kenyamanan sebaik mungkin dari sudut pandang masyarakat. Hal ini bisa diperoleh dengan mengaktifkan hasil yang lebih baik pada kebijakan, layanan berkualitas tinggi, keterlibatan publik yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pemerintah, dan dengan meningkatkan output kunci lainnya yang mungkin diidentifikasi.

Visi e-government adalah untuk membentuk kerangka TI menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transisi ke pemerintah yang jelas, transparan, dan efisien. Sejak akhir 1980-an TI telah diakui sebagai alat yang efektif untuk proses berinovasi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

E-government mencakup empat elemen, proses kerja internal, pelayanan kepada masyarakat, informasi manajemen sumber daya, dan pembaharuan hukum. Jadi model evolusi e-government merupakan empat cakupan hal tersebut secara selaras. Ketika mengevaluasi e-government dengan model keseimbangan empat daerah menjadi faktor yang lebih penting

Tuntutan perubahan dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatan secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pengembangan e-Government adalah cara pemerintah dalam menyesuaikan diri pada kecenderungan global. Ketidakmampuan diri dalam menyesuaikan kecenderungan ini dapat membawa bangsa Indonesia dalam “*digital divide*”.

2.1.5 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai ‘input’ untuk diubah menjadi ‘output’ berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digurunakan untuk beroperasi, manusia dan sebagainya (Marnis & Priyono, 2018). Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang paling

penting. Untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia (MSDM). MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan (*policy*).

Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM. Di dalam buku ini dikemukakan lima fungsi, yaitu:

1. Perencanaan untuk kebutuhan SDM

Fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi dua kegiatan utama, yaitu:

- a. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun panjang.
- b. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan MSDM secara efektif.

2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi

Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat dua kegiatan yang diperlukan, yaitu:

- a. Penarikan (rekrutmen) calon atau pelamar pekerjaan.
- b. Pemilihan (seleksi) para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat.

Umumnya rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja baik yang ada di luar organisasi (eksternal) maupun dari dalam organisasi (internal).

3. Penilaian kinerja

Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif dimana pekerja tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan utama, yaitu:

- a. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja.
- b. Analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja.

Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik.

4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja

Saat ini pusat perhatian MSDM mengarah pada tiga kegiatan strategis, yaitu:

- a. Menentukan, merancang dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan.
- b. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktifitas.

- c. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Salah satu *outcome* yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan strategis tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja.

5. Pencapaian efektifitas hubungan kerja

Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi gaji dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu organisasi juga harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat tiga kegiatan utama, yaitu:

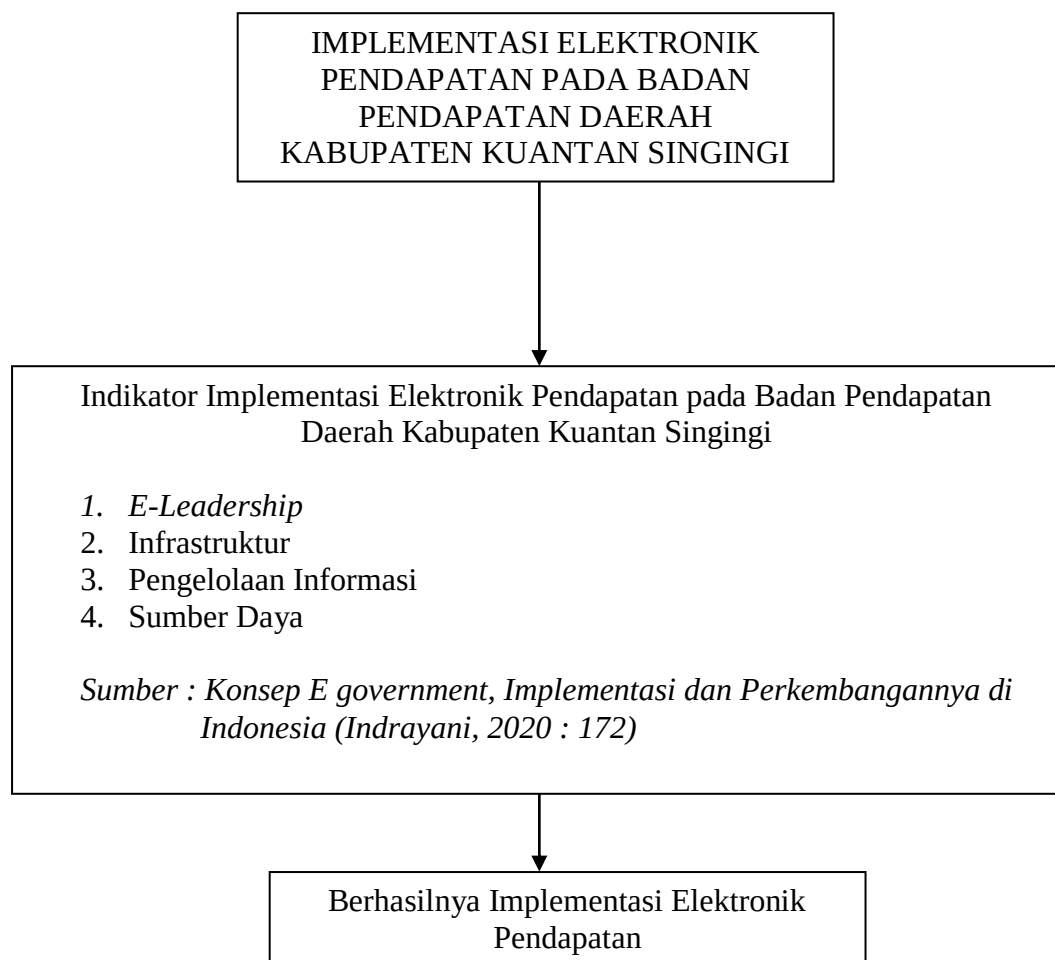
- a. Mengakui dan menaruh rasa hormat (respek) terhadap hak-hak pekerja.
- b. Melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan
- c. Melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan MSDM.

Persoalan yang harus diatasi dalam ketiga kegiatan utama tersebut sifatnya sangat kritis. Jika organisasi tidak berhati-hati dalam menangani setiap persoalan hak-hak pekerja maka yang muncul kemudian adalah aksi-aksi protes seperti banyak terjadi di banyak perusahaan di Indonesia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka berfikir penelitian sangat diperlukan untuk menunjukkan bagaimana batasan–batasan fokus penelitian ini dilaksanakan. (Daulay et al., 2021)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Implementasi Elektronik Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis sementara di dalam pelaksanaan e-pendapatan belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan baru bisa digunakan oleh pegawai internal.

2.4 Definisi Operasional

Dari Kerangka Pemikiran 2.1 terdapat beberapa indikator yaitu E-Leadership, Infrastruktur, Pengelolaan Sumber Informasi, dan Sumber daya berikut penjelasan mengenai beberapa indikator tersebut :

1. *E-Leadership*

Mengacu pada serangkaian kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk membimbing, memengaruhi, dan memotivasi suatu kelompok dengan menggunakan perangkat digital secara cerdas. *E-leadership* menandakan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi baru secara optimal dalam suatu perusahaan atau organisasi, atau untuk memperkenalkan solusi digital ke dalam sektor tempat seseorang beroperasi. Keterampilan *e-leadership* terdiri dari kombinasi kemampuan kepemimpinan tradisional dan keterampilan khusus untuk lingkungan digital. Dengan demikian, tradisi dan digitalisasi menyatu menjadi satu sosok.

2. Infrastruktur

Fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan

3. Pengelolaan Informasi

Proses untuk membuat, mendapatkan, mengatur, menyimpan, mendistribusikan, dan menggunakan informasi. Pengelolaan informasi juga dapat diartikan sebagai manajemen proses dan sistem yang

memastikan informasi dibuat, diproses, didistribusikan, dan diatur dengan cara yang tepat

4. Sumber Daya

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 Operasional Variabel Implementasi Elektronik Pendapatan pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi	Implementasi Elektronik Kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	E-Leadership	Komunikasi Digital
			Pemberdayaan Pegawai Melalui Teknologi
		Infrastruktur	Jaringan Teknologi
			Peralatan Teknologi
		Pengelolaan Informasi	Keamanan Informasi
		Sumber Daya	Sumber Daya Manusia
			Sumber daya Finansial

Sumber : Modifikasi Peneliti 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel dari populasi tersebut. (Sugiyono,2018:7)

Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri atau variable bebas) tanpa membuat perbandingan variable itu sendiri. (Sugiyono,2018:35)

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistic yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Elektronik Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Responden

Responden merupakan individu atau kelompok yang memberikan informasi atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti dalam proses pengumpulan data. Menurut Neuman (2014, dalam literatur yang digunakan secara luas hingga kini), responden adalah sumber utama data yang diperoleh melalui instrumen penelitian seperti kuesioner, wawancara, atau survei.

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jumlah Responden Penelitian Implementasi Elektronik Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Unsur Informan	Jumlah	
		Jumlah	Key Informan
1	Pegawai Badan Pendapatan Daerah	18	1
Jumlah		3	1

Sumber : Data Olahan Peneliti 2024

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian. (Sugiyono, 2018:256).

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, jurnal, artikel, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. (V. Wiratna Surjarweni, 2018:6).

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden.

3.5.2 Observasi

Penelitian dilakukan dengan cara langsung turun lapangan dengan data data yang penulis butuhkan dalam penelitian

3.5.3 Dokumentasi

Data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknologi (Kamera) selama melakukan penelitian di lapangan.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Penskoran

Menurut (Sugiyono, 2013, hal. 93) skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekumpulan orang mengenai situasi yang terjadi lingkungan sosial.

Tabel 3. 2 Penskoran Skala *Likert* Pada Penelitian

Jawaban Responden	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

(Sari & Amrozi, 2020)

3.6.2 Penyajian Data

Untuk menyajikan data agar hasilnya berupa angka dan disimpulkan dalam bentuk tabel frekuensi, Rumus persentase yang digunakan untuk menghitung data dalam penelitian ini adalah:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

f = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah frekuensi atau banyak individu

Data yang dipersentasekan kemudian direkapitulasikan dan diberi kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Kategori Penskoran Skala Persentase

Persentase	Keterangan	Interpretasi
81 - 100 %	Sangat Setuju	Sangat Efektif
61- 80 %	Setuju	Efektif
41 – 60 %	Netral	Cukup Efektif
21 – 40 %	Tidak Setuju	Tidak Efektif
0 – 20 %	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Efektif

(Sari & Amrozi, 2020)

Penelitian ini dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan

[illegible]

BAB IV

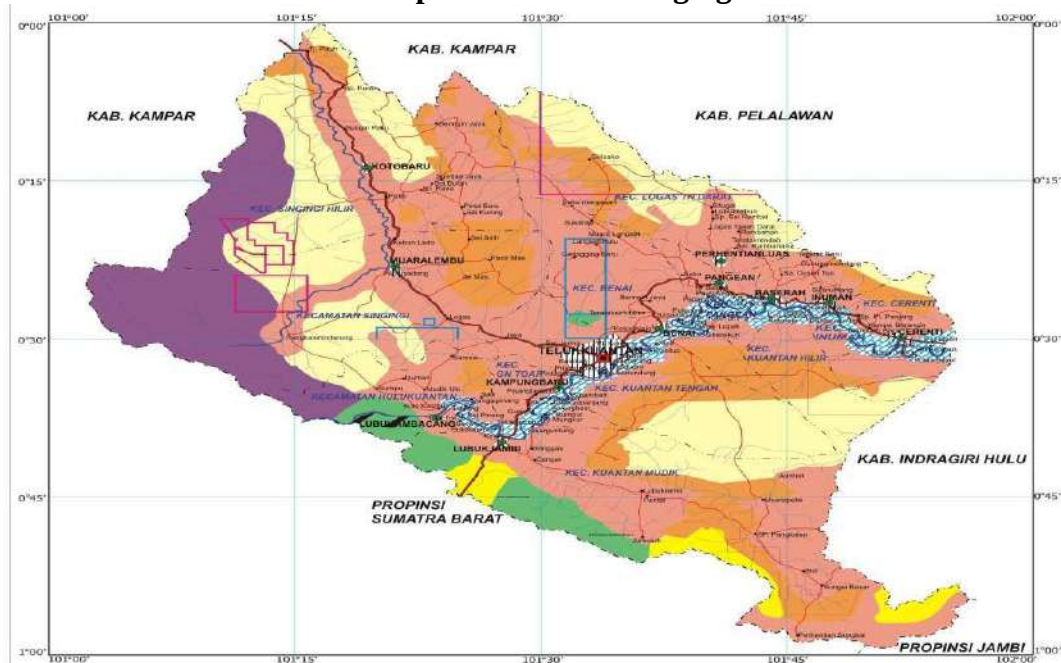
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten kuantan singingi adalah salah satu kabupaten di provinsi riau, Indonesia, dengan ibukota taluk kuantan. Kabupaten kuantan singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada pada bagian selatan provinsi riau. Kabupaten kuantan singing merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri hulu yang dibentuk berdasarkan uu no. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, rokan hilir, rokan hulu, siak, natuna, karimun, kuantan singingi dan batam.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : <https://kuansing.go.id/id/page/peta-wilayah.html>

Kabupaten kuantan singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kuantan singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui undang-undang nomor 53 tahun 1999, kabupaten Indragiri hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu kabupaten Indragiri hulu dengan ibu kotanya rangat dan kabupaten kuantan singingi dengan ibu kotanya taluk kuantan. Pada saat ini kabupaten kuantan singingi telah menjadi sebuah kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan yakni kecamatan pucuk rantau, kecamatan hulu kuantan, kecamatan kuantan mudik, kecamatan gunung toar, kecamatan kuantan tengah, kecamatan sentajo raya, kecamatan benai, kecamatan pangean, kecamatan logas tanah darat, kecamatan kuantan hilir, kecamatan kuantan hilir seberang, kecamatan inuman, kecamatan cerenti, kecamatan singingi dan kecamatan singingi hilir.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis kabupaten kuantan singingi terletak dibagian selatan provinsi riau, dengan posisi 0°00 lintang utara sampai 1°00 lintang selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 bujur timur. Luas wilayah kabupaten kuantan singingi adalah $\pm 7.656 \text{ km}^2$ (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar provinsi riau dengan jarak dari laut berkisar $\pm 120 \text{ Km}$ dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan pelalawan
- b) Sebelah barat berbatasan dengan provinsi sumatera barat
- c) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten indragiri hulu
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi jambi.

Berikut rincian luas wilayah kabupaten kuantan singingi berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821.64	82.164	10,73
2	Hulu Kuantan	384.40	38.440	5,02
3	Kuantan Mudik	564.28	56.428	7,37
4	Gunung Toar	165.25	16.525	2,16
5	Kuantan Tengah	270.74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145.7	14.570	1,9
7	Benai	124.66	12.466	1,63
8	Pangean	145.32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380.34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148.77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29	11.429	1,49
12	Inuman	450.01	45.001	5,88
13	Cerenti	456.00	45.600	5,96
14	Singingi	1.953,66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	1.530,97	153.097	20,00
Jumlah		7.656,03	765.603	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di kabupaten kuantan singingi yaitu mencapai 7.656,03 Km². secara administratif kabupaten kuantan singingi terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah kecamatan singingi dengan luas 1.953,66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah kecamatan kuantan hilir seberang dengan luas wilayah 114.29 km².

Kabupaten kuantan singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu maksimum berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49-433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d februari dan musim kemarau berkisar pada bulan maret s/d agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi koppen, tiap iklim kabupaten kuantan singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1,500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten kuantan singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

4.1.3 Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, kabupaten kuantan singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut dan dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah

pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di kabupaten kuantan singingi adalah sungai kuantan/Indragiri, sungai teso dan sungai singing. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah orgonosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten

4.1.1.1 Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di kabupaten kuantan singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi	Jumlah Penduduk	
	2022	2023
Kuantan Mudik	25.829	26.027
Hulu Kuantan	9.546	9.941
Gunung Toar	14.200	14.440
Pucuk Rantau	10.540	11.786
Singingi	35.427	36.545
Singingi Hilir	44.073	45.324
Kuantan Tengah	53.835	54.381
Sentajo Raya	31.639	32.496

Kabupaten Kuantan Singingi	Jumlah Penduduk	
	2022	2023
Benai	16.801	17.754
Kuantan Hilir	14.304	14.757
Pangean	20.724	21.051
Logas Tanah Darat	24.416	26.593
Kuantan Hilir Seberang	11.411	11.409
Cerenti	15.940	16.747
Inuman	17.165	16.995
Kuantan Singingi	345.850	356.246

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024

4.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

4.2.1 Sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1993.

Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mngutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan yang dituangkan dalam pada Kabupaten Kuantan nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan.

4.2.2 Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah “ Terwujudnya optimalisasi pendapaatan daerah melalui aparat yang ramah, Profesional dan Inovatif “.

1. Optimalisasi “Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi”
2. Ramah “Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
3. Profesional “Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi”
4. Inovatif “Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.”

Dan untuk misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ialah Sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- 2) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi
- 3) Meningkatkan Pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah
- 4) Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai

4.2.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk Operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran

Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan kegiatan Eksensifikasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan layanan prima kepada wajib pajak
4. Meningkatkan Sosialisasi Produk-produk hukum pajak dan Retribusi

Dan berikut merupakan sasaran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal 10 % dari tahun sebelumnya
2. Terlaksananya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Terlaksananya Pelayanan dan Penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu.
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib
5. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel.
6. Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah

7. Terpenuhiya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis
9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah
10. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya
11. Terlaksananya sistem prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh unit kerja Pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah.
12. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai.

4.2.4 Dasar Hukum Pembentukan dan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahu 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 96 ayat a dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) kewenangan yakni

1. Perencanaan dan Pengendalian.
2. Pelatihan bidang Pendapatan
3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang Pendapatan.
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang Pendapatan
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan
11. Penyusunan rencana bidang pendapatan
12. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa
13. Penyelenggaraan sistem bidang pendapatan daerah
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan
15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang- undangan bidang pendapatan daerah
16. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.